

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI JAWA TIMUR PADA MASA COVID-19

Gupita Gustiarni dan Amir Hidayatulloh

Universitas Ahmad Dahlan

amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the determinants of regional original income in East Java during the Covid-19 period. The population of this study is all city/district APBD realization data in Indonesia in 2020. Meanwhile, the research sample is data on city/district APBD realization in East Java. The data analysis technique of this study used multiple linear regression analysis. This study obtained the results that local revenue in East Java during the Covid-19 period was influenced by restaurant taxes and hotel taxes. However, the entertainment taxes did not affect local revenue in East Java during the Covid-19 pandemic. This is because in 2020, cinemas will stop operating.

Keywords: *Restaurant Taxes, Hotel Taxes, Entertainment taxes, Local Revenue, Covid-19*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis determinan pendapatan asli daerah di Jawa Timur pada masa covid-19. Populasi penelitian ini adalah semua data realisasi APBD kota/kabupaten yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Sedangkan, sampel penelitian adalah data realisasi APBD kota/kabupaten di Jawa Timur. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah di Jawa Timur pada masa covid-19 dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel. Akan tetapi, pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Timur pada masa pandemi covid-19. Hal ini karena pada tahun 2020, bioskop berhenti beroperasi.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Covid-19

PENDAHULUAN

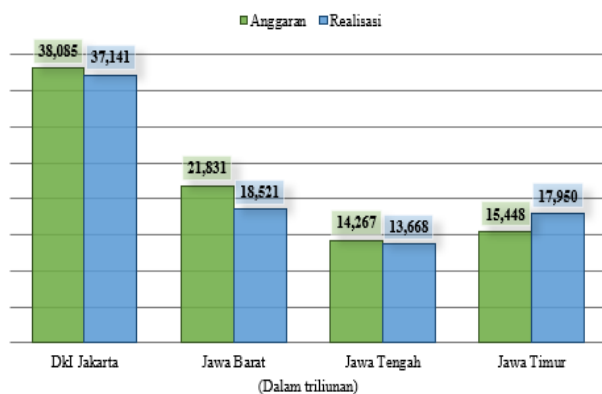
Salah satu keharusan negara adalah menyediakan kebutuhan warga negaranya. Guna mengusahakan bermacam tugas yang bermanfaat untuk warga negaranya maka dibutuhkan anggaran. Adanya anggaran, negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Anggaran yang dimaksud yaitu berupa uang, meskipun ada pengecualian pembiayaan yang dibantu secara material oleh beberapa pihak tertentu. Dalam memperoleh uang tidak hanya mencetak atau meminjam ke luar negeri, ada banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan uang. Agar dapat melayani segala keperluan rakyat, maka pemerintah daerah diberi otoritas baik dalam politik maupun keuangan (Lubis, 2017).

Dalam otonomi daerah, Pemerintah kabupaten/kota mendapat kekuasaan yang lebih luas dalam mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Termasuk dalam hal menarik pajak daerah yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku (Samudra, 2015). Dengan penerapan otonomi daerah, seluruh aspek pemerintah dari

perencanaan, penerapan, pengawasan, pengendalian, serta penilaian wajib dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah juga wajib mengoptimalkan anggaran agar dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan anggaran, pemerintah membuat APBD dengan terstruktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja (Habib, 2020).

Dalam penerapannya, APBD wajib terencana kepada sasaran dengan metode yang efisien serta efektif. Salah satu komponennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan kepunyaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018). Pajak daerah sendiri dibagi kedalam dua bagian yaitu pajak kabupaten/kota serta pajak provinsi. Pajak kabupaten/kota beberapa diantaranya terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

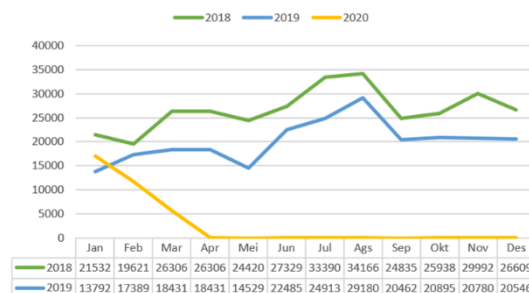
Adanya PAD diharapkan dapat mengurangi subsidi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri. Begitu pula dengan propinsi Jawa Timur, untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur memiliki potensi daerah yang dapat digali hingga dikelola sehingga dari potensi tersebut bisa memperoleh pemasukan pada penerimaan PAD. Semakin tinggi pemasukan uang yang didapat oleh daerah membuktikan bahwa daerah tersebut bertambah mandiri. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah dari beberapa provinsi di pulau jawa



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2020
Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

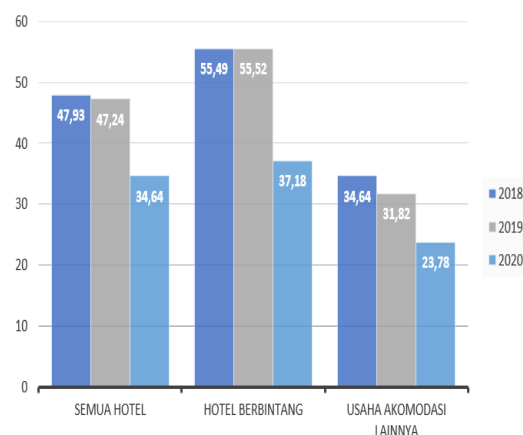
Gambar 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur berhasil mencapai 104,94% (Jatim BPK, 2021). Berbeda dengan ketiga Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) yang menghadapi penyusutan di tahun 2020. Banyaknya provinsi yang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya disebabkan oleh munculnya wabah Covid-19 di awal tahun 2020.

Selain berdampak pada kegiatan ekonomi, penyebaran covid-19 juga berdampak pada industri pariwisata. Adanya pandemi ini menyebabkan penurunan dratis jumlah wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan ke Propinsi Jawa Timur tahun 2020 turun sebanyak 85,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS Jawa Timur, 2021). Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tiga tahun terakhir disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Wisatawan Mancanegara
Sumber: (BPS Jawa Timur, 2021)

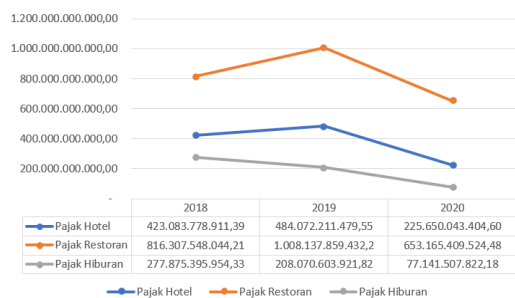
Dengan berkurangnya wisatawan yang berkunjung, secara tidak langsung juga berdampak pada berkurangnya tingkat penghuni kamar yang menginap di hotel. Jumlah tingkat penghuni kamar yang menginap di propinsi Jawa Timur disajikan pada gambar 3.



Gambar 3. Tingkat Penghuni Kamar di Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam persentase)
Sumber: (BPS Jawa Timur, 2021)

Jika tingkat penghuni kamar tinggi dan hingga hampir menyentuh 100%, hal ini bermakna bahwa sebagian besar kamar laku terjual. Dari gambar 3 terlihat perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya, tingkat penghuni kamar tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sementara itu dikutip melalui laman suarasurabaya.net, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan di tahun 2020 sudah sebanyak 100 hotel dan restoran di Jawa Timur mengajukan tutup permanen (Suminar, 2021).

Bertambahnya jumlah hotel dan restoran di Jawa Timur menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi dan peluang sumber pendapatan daerah yang ditawarkan. Tentunya hal ini membuat pendapatan pemerintah kabupaten/kota bertambah dalam sektor pajak daerah, seperti yang disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Propinsi Jawa Timur.

Sumber: (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

Gambar 4 menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dari tahun 2018 ke tahun 2019 selalu mengalami kenaikan, sedangkan pajak hiburan mengalami penurunan. Sedangkan, pada tahun 2019 ke 2020 dari pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan mengalami penurunan.

Menurut (Olga & Andayani, 2021), pajak hiburan tidak berdampak pada PAD, akan tetapi hasil ini berbeda dengan (Biki & Udaili, 2020) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berdampak pada PAD. Sedangkan, pada pajak restoran (Biki & Udaili, 2020; Sofwan et al., 2021) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh pada PAD. Sedangkan, dampak pajak hotel terhadap PAD dalam penelitian (Olga & Andayani, 2021) menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berdampak pada PAD, namun (Sofwan et al., 2021) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh pada PAD. Dengan demikian, dari uraian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah semua data realisasi APBD kota/kabupaten yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Sampel penelitian ini adalah data realisasi APBD kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2020. Sumber data dalam riset ini didapat lewat Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara Republik Indonesia (DJPK) yang dapat diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Data yang diperoleh berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari dana pengumpulan pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020.

Pajak hiburan adalah besarnya pajak hiburan yang dibayarkan merupakan hasil perkalian antara tarif pajak dengan standar penilaian. Tarif pajak hiburan dikenakan hingga 35%. Dalam

Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

penelitian ini, pajak hiburan bisa ditentukan dengan persamaan berikut (Fikri & Mardani, 2017):

Pajak Restoran dikenakan pada restoran berdasarkan pengumpulan biaya restoran dalam jumlah biaya yang dibeli atau seharusnya diperoleh oleh restoran. Tarif pajak dari pajak ini sebesar 10%. Dalam penelitian ini, pajak restoran bisa ditentukan menggunakan persamaan berikut (Fikri & Mardani, 2017):

Pajak restoran terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Pajak Hotel diambil atas *service* yang diberikan oleh pihak penginapan. Berdasarkan beban berbagai pengeluaran yang harus dibayarkan ke penginapan dengan tarif bea masuk 10%. Dalam penelitian ini, pajak hotel dapat ditentukan dengan persamaan berikut (Fikri & Mardani, 2017):

Pajak hotel terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan oleh daerah yang berawal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli daerah ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Suryani & Pariani, 2018):

PAD: pajak daerah+retribusi daerah+hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+lain-lain PAD yang sah

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Akan tetapi, sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitin ini melakukan uji asumsi kalsik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineraritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan pengujian asumsi klasik, dan penelitian ini memenuhi pengujian asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Signifikasi	Kesimpulan
Pajak Hiburan	0,020	0,681	Tidak Terdukung
Pajak Restoran	0,740	0,000	Terdukung
Pajak Hotel	1,160	0,000	Terdukung
Variabel Dependen	Pendapatan Asli Daerah		
Konstanta	-0,031		
Signifikasi F	0,000		
Adjusted R-Square	0,990		

Sumber: data sekunder, diolah (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di Jawa Timur dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel. Hal ini ditunjukkan pada masing-masing nilai signifikasi yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 (signifikasi pajak restoran 0,000 dan signifikasi pajak hotel 0,000).

Adanya kemajuan restoran di tiap daerah membuat penerimaan pajak restoran semakin besar, dengan demikian akan berpengaruh pada PAD. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Biki & Udaili, 2020; Sofwan et al., 2021) yang menemukan hasil bahwa pajak restoran berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan pajak, pajak hotel harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah yang akhirnya akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiyati et al., 2021; Sofwan et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi oleh pajak hiburan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi (0,681) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Olga & Andayani, 2021), Subjek pajak hiburan dilihat dari jumlah penonton yang menonton atau menikmati hiburan. Secara spesifik peningkatan pajak hiburan dipengaruhi oleh jumlah penonton atau pengunjung objek wisata.

Realitanya selama tahun 2020 semua bioskop berhenti beroperasi, di Jawa Timur sendiri bioskop pertama yang beroperasi kembali yaitu bioskop CGV Sunrise Mall di Kota Mojokerto dengan kapasitas 30% (34 orang/studio) pada bulan Oktober 2020 (Suminar, Pertama di Jatim, Bioskop CGV Sunrise Dibuka Lagi, 2020). Sedangkan bioskop lainnya di Jawa Timur baru mulai beroperasi pada awal April 2021 (Setiawan, 2021). Pemerintah provinsi Jawa Timur sendiri memberikan batasan waktu operasional bagi tempat wisata dan hiburan malam atau menutup usahanya untuk sementara (Perdana, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan kemungkinan dari pemerintah Jawa Timur pada tahun 2020 tidak memfokuskan terhadap peningkatan pajak hiburan.

PENUTUP

Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur dipengaruhi oleh pada masa pandemi covid-19 dipengaruhi oleh pajak restoran dan pajak hotel. Akan tetapi, tidak dipengaruhi oleh pajak hiburan. Hal ini karena, pada tahun 2020 semua bioskop berhenti beroperasi, termasuk di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Timur juga memberikan batasan waktu operasional atau

menutup sementara bagi tempat wisata dan hiburan malam.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian berfokus di Jawa Timur yang notabene adalah daerah pariwisata, dengan demikian hasil ini penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian atau dapat menggunakan propinsi yang bukan destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol.7, No.2, 7(2), 116–130. <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>
- BPS Jawa Timur. (2021). *Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2020*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Data Series APBD. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*, 6(2), 84–98.
- Habib, F. (2020). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. <https://web.syekhnurjati.ac.id/htni/2020/03/17/pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dalam-penyelenggaraan-otonomi-daerah/>
- Jatim BPK. (2021). *Target PAD Jatim 2020 Tembus 104,94 Persen. Diambil kembali dari BPK RI*. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/target-pad-jatim-2020-tembus-10494-persen/#:~:text=Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa,ditargetkan sebesar Rp 30%2C142 triliun>
- Lubis, D. F. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun* [Universitas Sumatera Utara]. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/866>
- Olga, M. A., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pad Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*,

- 8(2), 596–610.
- Perdana, D. (2020). *Pemprov Mendorong Tempat Wisata dan Hiburan Malam di Jatim Dibatasi atau Ditutup*.
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pemprov-mendorong-tempat-wisata-dan-hiburan-malam-di-jatim-dibatasi-atau-ditutup/>
- Rahmiyatun, F., Ratiyah, Hartanti, & Aliudin, R. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek*, 10(2), 94–99.
<https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109>
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, A. (2021). *Cek Daftarnya! Sejumlah Bioskop di Surabaya Kembali Beroperasi*.
<https://jatim.jpnn.com/dadi-omongan/468/cek-daftarnya-sejumlah-bioskop-di-surabaya-kembali-beroperasi>
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Bandung Periode 2013-2020. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 13–24.
<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Suminar, A. (2021). *PHRI Jatim: Ada 100-an Lebih Hotel dan Restoran yang Mengajukan Tutup*.
<https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2021/phri-jatim-ada-100-an-lebih-hotel-dan-restoran-yang-mengajukan-tutup/>
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *No Title*. Deepublish.